

Pengaruh PAD dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2020

Zesmi Kusmila

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci

Email: zesmila@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Apakah ada pengaruh PAD dan Belanja Modal, terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Kabupaten Kerinci Tahun 2014 - 2020 secara parsial. 2) Apakah ada pengaruh PAD dan Belanja Modal terhadap tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Kerinci Tahun 2014 – 2020 secara simultan. 3) Besarnya pengaruh PAD dan Belanja Modal Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Kabupaten Kerinci Tahun 2014 - 2020. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait yang kemudian diolah menggunakan software SPSS dengan melalui pengujian yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian. Hasil yang diperoleh adalah 1) Secara parsial, Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 - 2020. 2) Secara parsial, belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kerinci pada tahun 2014 - 2020. 3.) Secara simultan, PAD dan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian finansial Kabupaten Kerinci Tahun 2014 – 2020. 4) Besarnya pengaruh variabel PAD dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Kerinci sebesar 74,7%.

Kata Kunci : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Tingkat Kemandirian Keuangan.

Abstract

This study aims to determine: 1) Is there any effect of PAD and Capital Expenditure on the level of financial independence of Kerinci Regency in 2014 - 2020 partially. 2) Is there any influence of PAD and Capital Expenditure on the level of financial independence of Kerinci Regency in 2014 – 2020 simultaneously. 3) the large influence of PAD and Capital Expenditures on the level of financial independence of Kerinci Regency in 2014 - 2020. The research methodology used is a descriptive quantitative approach, the type of data used in this study is secondary data obtained from relevant agencies which then processed using SPSS software by going through tests related to research needs. The results obtained are 1) Partially, Regional Original Income does not significantly affect the level of regional financial independence of Kerinci Regency in 2014 - 2020. 2) Partially, capital expenditures have an insignificant effect on the level of regional financial independence of Kerinci Regency in 2014 - 2020. 3.) Simultaneously, PAD, Modan Expenditures and Personnel Expenditures do not affect the level of financial independence of the Kerinci Regency in 2014 – 2020. 5) The magnitude of the influence of the variables of PAD and Capital Expenditure on the Level of Regional Financial Independence in Kerinci Regency is 74.7%.

Keywords: Influence Of Regional Original Income, Capital Expenditure, , Level Of Financial Independence.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah secara resmi dilaksanakan di Indonesia sejak 1 Januari 2001, ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah. 32 tahun 2004 dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan anggaran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diubah dengan undang-undang nomor 33 tahun 2004, mewajibkan daerah untuk kreatif mencari sumber pendapatan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pemerintahan daerah sendiri bertujuan untuk mencapai kemandirian daerah sehingga daerah bebas mengatur sendiri tanpa perlu campur tangan pemerintah pusat.

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan dengan meningkatkan pemerataan dan keadilan. Dari berbagai rumusan otonomi daerah dalam Undang-Undang yang pernah berlaku, otonomi daerah memiliki makna korelatif sebagai kewenangan dan kemandirian daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri untuk kepentingan masyarakat (Santoso, 2014). Pergeseran komposisi belanja ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal. Defitri (2020) menemukan bahwa pembangunan infrastruktur publik mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2018).

Sarug dan Sagbas (2008) menemukan bahwa dana transfer ke pemerintah daerah (intergovernmental transfer) dapat menjadi substitusi ataupun dapat menjadi stimulus dalam belanja daerah. Apabila efek substitusi ditemukan maka pemerintah daerah akan mengeluarkan pengeluaran yang lebih sedikit dibandingkan dengan dana transfer dari pemerintah pusat yang mereka terima yang dapat menyebabkan penurunan penerimaan pajak. Sebaliknya apabila efek stimulus yang ditemukan, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan upaya pajak daerahnya. Akan tetapi pemberian transfer pemerintah pusat/provinsi yang seharusnya menjadi stimulus peningkatan kemandirian daerah, justru direspon berbeda oleh daerah, daerah tidak menjadi lebih mandiri semakin bergantung pada pemerintah pusat (Adi, 2008). Pemberian transfer pemerintah pusat/provinsi yang semula bertujuan untuk mengurangi kesenjangan horizontal, justru menjadi disinsentif bagi daerah untuk mengupayakan peningkatan kapasitas fiskal daerahnya. Upaya pajak menjadi lebih rendah, harapan adanya peningkatan kemandirian daerah justru menjadi semakin jauh.

Putri (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Pola hubungan keuangan daerah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dapat diinterpretasikan sebagai "Pola Hubungan Instruktif", dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah, hal ini dapat dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dari tahun 2010 s/d 2014. Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kerinci sejak tahun 2014 – 2020 menunjukkan bahwa pendapatan daerah sedikit lebih besar dari belanja daerah Kabupaten Kerinci masih ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat ataupun provinsi, dikarenakan belanja pegawai dan belanja modal masih tinggi dibandingkan pendapatan asli daerah. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "PENGARUH PAD DAN BELANJA MODAL TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2014 – 2020".

Hipotesis

Hipotesis Secara Parsial

Hipotesis dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya atau uji secara masing-masing, yaitu sebagai berikut :

- H₀ : r = 0 : Diduga Tidak Terdapat Pengaruh Yang Signifikan Antara Variabel PAD Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci
- H₁ : r ≠ 0 : Diduga Terdapat Pengaruh Yang Signifikan Antara Variabel PAD Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci
- H₀ : r = 0 : Diduga Tidak Terdapat Pengaruh Yang Signifikan Antara Variabel Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci
- H₂ : r ≠ 0 : Diduga Terdapat Pengaruh Yang Signifikan Antara Variabel Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci
- Hipotesis Secara Simultan
- Hipotesis uji F adalah uji pengaruh dari semua variabel bebas terhadap variabel terikat atau uji secara serentak/simultan, yakni :
- H₀ : r = 0 : Diduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara PAD dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci
- H_a : r ≠ 0 : Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara PAD dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif Kuantitatif yang bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk mencadarkan karakteristik individu atau kelompok. Penelitian ini menilai sifat dari kondisi-kondisi yang tampak.

Alat Analisis Data Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui persentase kontribusi variabel X terhadap variabel Y, maka ditentukan koefisien determinasi dengan rumus sebagai berikut Maimunah (2006) :

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Dimana :

KD = Koefisien Determinasi

r = Koefisien Korelasi.

Uji statistik "t" (Parsial)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). Uji ini menggunakan rumus Sumodiningrat (2007).

$$t_{hit} = \frac{\beta_i}{S\beta_i}$$

Dimana :

t_{hit} = nilai pengujian

β_i = koefisien regresi variabel i

Sβ_i = standar error koefisien regresi variabel i. Jika t_{hitung} ≥ t_{tabel} atau - t_{hitung} < - t_{tabel}, maka

H_a diterima H₀ ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Tetapi jika t_{hitung} < t_{tabel} atau - t_{hitung} ≥ - t_{tabel}, maka H_a ditolak dan H₀ diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependennya.

Uji Statistik "f" (Simultan)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas (X₁, X₂, ..., X_n) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat (Y) atau untuk mengetahui apakah model ini dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak Sumodiningrat (2007). Uji ini menggunakan rumus :

$$F = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

Dimana :

F_{hit} = Nilai pengujian

R² = Koefisien determinasi

k = Jumlah variabel bebas

n = Banyak nilai observasi

Nilai Fhitung yang dihasilkan dari perhitungan di atas dengan tingkat kesalahan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan derajat kebebasan sebesar $(n-k-1)$, dengan ketentuan mengambil keputusan sebagai berikut : apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka hipotesa nol (H_0) diterima dan hipotesa alternatif (H_a) ditolak, berarti variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Begitu sebaliknya, apabila $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ maka hipotesa nol (H_0) ditolak dan hipotesa alternatif (H_a) diterima, berarti variabel independen memiliki pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Kerinci merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Jambi yang berdiri sendiri diikrarkan melalui kongres Sakti Alam Kerinci pada tanggal 12 Januari 1957 disungai penuh. Secara geografis wilayah kabupaten Kerinci terletak pada $01^{\circ}40'$ sampai dengan $02^{\circ}26'$ Lintang Selatan dan $101^{\circ}08'$ sampai dengan $101^{\circ}50'$ Bujur Timur dan dengan luas wilayah kabupaten Kerinci sebesar 332.807 Ha atau 3328,12 km². Lebih setengah dari luas wilayah TNKS dan 1337,15 km² sisanya digunakan untuk kawasan budidaya dan pemukiman penduduk. Dengan luas wilayah tersebut maka kabupaten Kerinci menjadi wilayah kabupaten terkecil ketiga di antara kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jambi.

Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci

Adapun tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kerinci dapat dilihat sebagai berikut

Tabel 1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2014 – 2020

Tahun	PAD (Juta Rupiah)	Bantuan pemerintah pusat + provinsi (Juta Rupiah)	Rasio kemandirian (%)	Pola hubungan
2014	61.634,81	118.125,09	0,52	Instruktif
2015	70.462,41	229.313,38	0,31	Instruktif
2016	80.850,84	188.792,17	0,43	Instruktif
2017	85.760,74	259.132,72	0,33	Instruktif
2018	80.481,17	266.075,18	0,30	Instruktif
2019	42.421,50	292.654,44	0,14	Instruktif
2020	81.737,44	287.021,06	0,28	Instruktif
Rata-rata			0,33	Instruktif

Sumber : Diolah.

Pada tabel diatas dapat di jelaskan bahwa pola hubungan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kerinci tahun 2014 – 2020 memiliki pola instruktif yaitu peranan pemerintah pusat dan provinsi lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial). Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kerinci tahun 2014 – 2020 adalah sangat rendah yang dibuktikan dengan rasio kemandirian sebesar 0,33%.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci

Adapun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kerinci tahun 2014- 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 Pertumbuhan Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2020 (Juta Rupiah)

Tahun	Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Pertumbuhan Pendapatan PAD (%)
2014	61.634,81	-
2015	70.462,41	14,32
2016	80.850,84	14,74
2017	85.760,74	6,07
2018	80.481,17	-6,16
2019	42.421,50	-47,29
2020	81.737,44	92,68

Sumber: Diolah

Pertumbuhan perolehan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci setiap tahunnya mengalami kenaikan dimana pada tahun 2015 terjadi peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci sebanyak 14,32%, pada tahun 2016 terjadi peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci sebanyak 14,74%, pada tahun 2017 terjadi peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci sebanyak 6,07%, pada tahun 2018 terjadi penurunan perolehan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci dari tahun sebelumnya sebanyak 6,16%, pada tahun 2019 terjadi penurunan perolehan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 47,29%, sedangkan pada tahun 2020 terjadi kenaikan perolehan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 92,68%. Dengan menurunnya pendapatan asli daerah dapat menyebabkan terganggunya stimulus perekonomian daerah Kabupaten Kerinci sehingga menyebabkan ketergantungan akan bantuan dari Pemerintah Pusat atau Provinsi.

Belanja Modal Kabupaten Kerinci

Adapun Belanja Modal Kabupaten Kerinci tahun 2014-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2020 (Juta Rupiah)

Tahun	Belanja Modal (Rp)	Pertumbuhan Belanja Modal (%)
2014	201.494,58	-
2015	177.166,55	-12,07
2016	198.781,60	12,20
2017	218.905,89	10,12
2018	191.868,19	-12,35
2019	286.691,47	49,42
2020	202.098,22	-29,51

Sumber: Diolah

Pertumbuhan belanja modal Kabupaten kerinci pada tahun 2015 adalah sebesar 12,07%, pada tahun 2016 adalah sebesar 12,20%, pada tahun 2017 adalah sebesar

10,12%, pada tahun 2018 adalah sebesar 12,35, pada tahun 2019 adalah 49,42% dan pada tahun 2020 adalah sebesar 29,51%. Dengan menurunnya belanja modal dapat menyebabkan naiknya pendapatan daerah dikarenakan persentase belanja daerah berkurang dan akan mendapatkan surplus dalam keuangan daerah.

Analisis Regresi Linear Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	17,161	11,003		1,560	,217
log_x1	,631	,757	,381	,834	,466
log_x2	-,833	1,278	-,310	-,652	,561

a. Dependent Variable: log_y
Sumber : Data olahan SPSS 20

Dari tabel diatas dapat dijelaskan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 17,161 + 0,631X_1 - 0,833X_2 - 2,879X_3$$

Keterangan persamaan

1. Nilai konstanta sebesar 17,161 artinya bahwa menunjukkan pengaruh positif variabel independen (PAD dan Belanja Modal,). Bila variabel independen tetap, maka kemandirian keuangan sebesar 17,161%.
2. PAD mempunyai nilai positif yaitu sebesar 0,631 artinya Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci, jika PAD ditingkatkan sebesar Rp. 1, maka Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci akan meningkat sebesar 0,631%.
3. Belanja Modal mempunyai nilai negatif yaitu sebesar -0,833 artinya Belanja Modal memiliki pengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kerinci, jika belanja modal ditingkatkan sebesar Rp. 1, maka kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kerinci akan menurun sebesar 0,833%.

Koefisien Determinasi Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,864 ^a	,747	,494	1,12746

a. Predictors: (Constant), log_x3, log_x1, log_x2
Sumber : Data olahan SPSS 20

Dari Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa korelasi antara variabel PAD dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci ditunjukkan oleh nilai R sebesar 0,747. Besarnya pengaruh (koefisien determinasi) ditunjukkan oleh nilai pada R-Square sebesar 0,747 yang dikalikan dengan 100%. Dengan demikian maka besarnya pengaruh variabel PAD, Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci adalah 74,7% dan sisanya sebesar 25,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Hasil Perhitungan Uji t Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	17,161	11,003		1,560	,217
log_x1	,631	,757	,381	,834	,466
log_x2	-,833	1,278	-,310	-,652	,561

a. Dependent Variable: log_y
Sumber : Data olahan SPSS 20

Dari tabel di atas diperoleh nilai t test antara X1 (PAD), X2 (Belanja Modal) dengan Y (Kemandirian keuangan) sebagai berikut :

- t hitung X1 (PAD) = 0,834 dan t tabel adalah sebesar 3,18245. Karena t hitung < t tabel yaitu 0,834 < 3,18245 serta dari tabel diperoleh nilai signifikansi 0,466 > 0,05. Hal ini berarti H₀ diterima dan H₁ ditolak, sehingga disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Kerinci.

t hitung X2 (Belanja Modal) = -0,652 dan t tabel adalah sebesar -3,18245. Karena t hitung > t tabel yaitu -0,652 > -3,18245 serta dari tabel diperoleh nilai signifikansi 0,561 > 0,05. Hal ini berarti H₂ diterima dan H₀ ditolak, sehingga disimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Kerinci.

Hasil Perhitungan Uji f ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,96	2	,048	1,954	,122 ^b
	Residual	,032	2	,016		
	Total	,120	4			

a. Dependent Variable: log_y
b. Predictors: (Constant), log_x1, log_x

Dengan tingkat signifikansi 0,05 dan df1 (k - 1) = 3 - 1 = 2 dan df2 (n-k) = 6 - 4 = 2, maka nilai F-tabel sebesar 9,28. Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4.11. di atas, maka nilai F-hitung sebesar 1,954. Jika dibandingkan dengan nilai F-tabel sebesar 9,28, maka F-hitung lebih kecil dari F-tabel (1,954 < 9,28). Artinya bahwa PAD dan Belanja Modal tidak berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Kerinci.

PEMBAHASAN

Pengaruh PAD terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci

Berdasarkan hasil uji t didapatkan bahwa t hitung X1 (PAD) = 0,834 dan t tabel adalah sebesar 3,18245. Karena t hitung < t tabel yaitu 0,834 < 3,18245 serta dari tabel diperoleh nilai signifikansi 0,466 > 0,05. Hal ini berarti H₀ diterima dan H₁ ditolak, sehingga disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Kerinci.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci

Berdasarkan hasil uji t didapatkan bahwa $t_{hitung} X_2$ (Belanja Modal) = -0,652 dan t_{tabel} adalah sebesar -3,18245. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $-0,652 > -3,18245$ serta dari tabel diperoleh nilai signifikansi $0,561 > 0,05$. Hal ini berarti H_2 diterima dan H_0 ditolak, sehingga disimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Kerinci.

SIMPULAN

Berdasarkan dari uraian diatas dan analisis bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial, Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kerinci tahun 2014 – 2020, hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} kecil dari nilai t_{tabel} ($0,834 < 3,18245$)
2. Secara parsial, belanja modal berpengaruh secara tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kerinci tahun 2014 – 2020, hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} besar dari nilai t_{tabel} ($-0,652 > -3,18245$)
3. Secara simultan, PAD dan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kerinci tahun 2014 – 2020, hal ini dibuktikan dengan nilai F_{hitung} lebih kecil dari nilai F_{tabel} ($2,954 < 9,28$).

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Kabupaten Kerinci diharapkan dapat memaksimalkan belanja modal dengan membangun konektivitas antar wilayah agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambah data observasi diluar kabupaten Kerinci sehingga dapat meningkatkan generalisasi hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Anggito, 2015. *Format Anggaran terpadu menghilangkan tumpangtindih*. Bapekki Depkeu.
- Ardiyos, 2017. *Kamus Standar Akuntansi*. Citra Harta Prima, Jakarta.
- Adi, Priyo Hari, 2005. "Pengaruh Belanja Pembangunan terhadap PAD". *Jurnal Studi Pembangunan KRITIS*. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.
- Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim, 2006. "Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan". *Jurnal Akuntansi Pemerintah vol.2*. Hal 17-32.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci. 2020. www.bps.go.id.
- Bastian, Indra, 2016. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Chatra, Suwitra. 2016. *Analisis Perbandingan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci Dan Kota SungaiPenuh*, Journal Benefita 1(3) October 2016 (184-192)
- Darwanto, 2006. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal". *Simposium Nasional Akuntansi X*, Makasar.
- Defitri, 2020. *Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat)*. Universitas Mahaputra Muhammad Yamin ISSN:2623-2480/ P-ISSN: 1693-5209
- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Laporan APBD, 28 November 2009, www.djpkpd.go.id.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

- Pusat dan Daerah, 2004.
- Fitriyani, Suwarno, 2021. *Pengaruh PAD, Dau, Belanja Modal, Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Vol. 1 No. 1.1 Mei 2021, hal. 61 – 69. ISSN 2776-2092
- Hadi, Syamsul, 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Akuntansi & Keuangan*, Cetakan Pertama, Ekonisia, Yogyakarta.
- Halim, Abdul, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2004. *Buku Petunjuk Teknik Penulisan Proposal Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Medan.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Marsyahrul, Tony, 2004. *Pajak Penghasilan*, Penerbit Grasindo. Jakarta.
- Nosihana, Ariefia dan Rizal Yaya, 2016. "Internet Financial Reporting dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya pada Pemerintah Kota dan Kabupaten di Indonesia", *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, Vol.3(2), 2016, pp 89-104.
- Putri, 2014. *Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Modal Dan Jumlah Aset Tetap Daerah Terhadap Kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 – 2013*.
- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah angan Negara.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pendapatan Asli Daerah.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah
- Santoso, H.P. 2014 *Pengaruh Corporate Governance Dan Rasio Keuangan Terhadap Financial Distress Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012*. Surabaya
- Wong, John D. 2014. The Fiscal Impact Of Economic Growth And Development On Local Government Capacity. *Journal of Pbulic Budgeting, Accounting and Financial Management*.